PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Imam Bonjol No. 134 Kota Semarang
dkpjateng@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP	:	DKP/SEKRET/UMPEG/09
TGL PEMBUATAN	:	09 Februari 2026
TGL REVISI	:	09 Februari 2027
TGL PENGESAHAN	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, M.A NIP. 19710909 199603 1 006
JUDUL SOP	:	**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2. Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3. Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4. Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5. Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi

KETERKAITAN:

1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
5. SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan
6. SOP Publikasi Informasi Publik
7. SOP Permohonan Informasi Publik
8. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
9. SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Formulir Permohonn Informasi
2. Register Permohonan Informasi
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

PERINGATAN

1. Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka citra positif pemerintah daerah terhadap masyarakt menjadi negatif

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik
2. Jenis Informasi
3. dasar Hukum Pengecualian Informasi
4. Jangka Waktu Pengecualiam Informasi

SOP Uji Konsekuensi Publik

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	OUTPUT	
	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan ketika: A. Sebelum adanya permintaan informasi publik. B. Pada saat adanya permintaan informasi publik, atau C. Pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner	MULAI						
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik				Daftar Informasi	Setiap Saat	Klasifikasi Informasi	Memulai alur
2	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	1 hari kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Proses
3	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Klasifikasi Informasi	1 hari kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan dicatat dalam Lembar Pertimbangan	Proses
4	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				Lembar Pertimbangan	1 hari kerja	Daftar Dasar Hukum	Proses
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Lembar Pertimbangan	1 hari kerja	Pertimbangan Tertulis	Proses
6	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta Uji Konsekuensi				Lembar Pertimbangan	1 hari kerja	Tanda tangan peserta	Proses
7	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID				Lembar Pertimbangan	1 hari kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana	Proses
8	Penandatanganan Penetapan Uji Konsekuensi oleh Atasan PPID				Draft Naskah SK DIK	1 hari kerja	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	Persetujuan
9	Mengumumkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya	SELESAI			SK DIK	1 hari kerja	Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan Start / Akhir Proses Proses	Persetujuan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah

ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, M.A
NIP. 19710909 199603 1 006